ESENSI NILAI PENDIDIKAN BAGI DAERAH RAWAN KONFLIK KALIMANTAN BARAT

Oleh:
Amrazi Zakso
(Pendidikan Sosiologi, FKIP, Universitas Tanjungpura, Pontianak)

Abstrak: Konflik antar etnis yang belakangan ini sering terjadi di Kalimantan Barat memerlukan upaya serius untuk menanganinya. Boleh jadi konflik tersebut akibat pendidikan yang salah urus, terlalu mengagungkan otak namun mengabaikan hati. Itu sebabnya perlu ada upaya internalisasi nilai multikultural. Harapannya, dengan nilai multikultural anak-anak dari berbagai kelompok etnis kelak di masa depan menjadi lebih baik, dan dapat hidup berdampingan secara damai.

Kata Kunci: Konflik Etnis, Esensi Nilai, Pendidikan Multikultural.

Pendahuluan

Sejarah Indonesia mencatat bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh karena adanya rasa persatuan dan kesatuan di antara berbagai etnis yang mendiami wilayah nusantara. Pada penghujung abad 20 dan awal abad 21 ini, rasa persatuan dan kesatuan serta semangat nasionalisme anggota masyarakat dari berbagai etnis pada daerah-daerah tertentu tampak seperti tercabik-cabik karena adanya kerusuhan atau konflik yang cenderung melibatkan etnis. Kalimantan Barat sebagai salah satu daerah yang dihuni oleh berbagai etnis tidak terlepas dari permasalahan tersebut. Mulai dari peristiwa Sanggau Ledo pada akhir tahun 1996 hingga awal 1997, dan kerusuhan Sambas tahun 1999 adalah contoh betapa Kalimantan Barat sangat rentan terhadap konflik etnis.

Koentjaraningrat (1982) sebenarnya telah mengingatkan bahwa Kalimantan Barat menyimpan potensi konflik yang terpendam antar suku bangsa, selain Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tengah. Dalam pandangan Koentjaraningrat, selain daerah itu relatif homogen, juga karena tidak adanya kebudayaan dominan *(dominant culture)* sebagai wadah pembauran *(melting pot)* dari masing-masing atau suku bangsa yang hidup di daerah tersebut.

Dari catatan Sudagung (1984) diketahui bahwa konflik etnis madura dengan etnis setempat di Kalimantan Barat mulai terjadi pada tahun 1933. Dalam catatan Polda Kalbar (1999) sejak 1962 hingga 1999 sudah terjadi 14 kali konflik etnis di Kalimantan Barat. Konflik-konflik tersebut terjadi antara komunitas Dayak dengan Tionghoa sebanyak 1 (satu) kali tahun 1967, Dayak dengan Madura sebanyak 11 (sebelas) kali yakni konflik yang terjadi tahun 1962, 1963, 1968, 1972, 1976, 1977, 1979, 1983, 1993, 1994, 1996-1997; dan Melayu dengan Madura sebanyak 2 (dua) kali yakni

konflik tahun 1998 dan 1999. Konflik berikutnya, tahun 2000 di Kota Pontianak, juga melibatkan etnis Melayu dengan Madura.

Sejak konflik pertama hingga terakhir upaya memecahkan konflik selalu dilakukan dengan cara membuat perjanjian damai antar etnis yang bertikai. Begitu konflik pertama terjadi, penyelesaiannya segera dilakukan dengan membuat perjanjian damai. Pecah lagi konflik kedua, oleh penguasa dibuat lagi perjanjian damai. Mengapa konflik-konflik itu terus berulang dan mengapa pula etnis yang terlibat dalam konflik selalu saja etnis Madura, menjadi pertanyaan semua orang.

Di level masyarakat awam, jawaban terhadap pertanyaan itu memang bisa bervariasi. Sebagian orang mengatakan pemerintahlah sebagai pihak yang harus bertanggungjawab atas terjadinya konflik itu. Begitu konflik pertama dapat diselesaikan mestinya pemerintah tidak cukup hanya menyuruh kedua etnis yang bertikai untuk menandatangani perjanjian damai. Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap kedua etnis yang bertikai agar perilaku kedua etnis tersebut mengarah pada perilaku kehidupan bernegara yang berwawasan kebangsaan. Sebagian orang lagi mengatakan bahwa orang Madura yang harus bertanggung jawab atas keseluruhan konflik yang ada di Kalimantan Barat, termasuk tragedi Sambas yang terjadi tahun 1999 yang memakan korban sangat besar dibanding dengan kerusuhan-kerusuhan lainnya. Pendapat yang kedua ini berangkat dari realitas kehidupan masyarakat Madura yang cenderung hidup mengelompok dalam etnis mereka sendiri. Mereka membangun mesjid atau madrasah (sekolah) untuk kelompok masyarakatnya saja meskipun di desa yang ditempatnya itu sudah ada mesjid atau madrasah (sekolah). Mereka menyekolahkan anaknya pada sekolah yang mereka bangun, dan shalat juga hanya di mesjid yang mereka dirikan. Selain itu, *ketidakmampuan petugas keamanan menangani persoalan premanisme dan pelaku kriminal secara profesional,* oleh masyarakat juga dituding sebagai bagian dari penyebab terjadinya konflik. Dalam bahasa yang banyak diungkapkan oleh kelompok etnis Madura: *"kalau mencuri kasih satu ayam jago, sudah lepas. Kalau membunuh, kasih satu sapi sudah lepas"*. Ini menunjukkan betapa tindak kriminal yang terjadi di Kalimantan Barat terlindungi. Dalam contoh lain, jika ada dua tokoh Madura sama-sama menyuap petugas, yang satu minta agar pertunjukkan ronggeng (biasanya berkonotasi negatif) jangan diberi izin, tetapi yang kedua minta agar ronggeng diberi izin, maka tokoh Madura kedua tadilah yang diikuti pendapatnya oleh aparat. Kelemahan atau *"ketidakmampuan"* aparat keamanan dalam menangani tindak kriminal dan praktek premanisme ini diakui oleh Kapolda Kalbar juga menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik (lihat laporan akhir Polda Kalbar tentang Kerusuhan Sambas, 1999).

Upaya mencari akar persoalan konflik telah pula dilakukan melalui penelitian. Tim Penelitian IIP (1997/1998) dan

Yasser Arafat (1998) menemukan bahwa akar persoalan konflik adalah karena tidak adanya asimilasi kebudayaan antara etnis Madura dengan etnis setempat. Meskipun sudah ditemukan bahwa akar persoalan seperti itu, namun hasil penelitian tersebut ternyata lebih banyak menimbulkan pertanyaan baru, antara lain mengapa etnis Madura itu tidak berasimilasi dengan etnis setempat, bagaimanakah sikap dan perilaku etnis Madura itu sendiri di tengah-tengah kebudayaan etnis setempat, serta mengapa terjadi prasangka negatif etnis setempat terhadap etnis Madura.

Penelitian lain dilakukan oleh Sarlito (2002) mencoba mengurai konflik antar etnis di Kalimantan Barat. Dari hasil penelitiannya dengan menggunakan teori nilai motivasi yang dikembangkan oleh S.H. Schwartz (1992; 1994), Sarlito (2002) menyimpulkan bahwa dalam kehidupan masyarakat di tiga etnis yang diamati, nilai motivasi lebih ditujukan pada etnis sendiri ketimbang menyeberang ke antar etnis. Di samping itu, keinginan yang sama kuat untuk mempertahankan tradisi di kalangan etnis Madura dan Dayak mengakibatkan konflik antar etnis Madura dengan Dayak lebih sering terjadi ketimbang dengan etnis Melayu yang lebih terbuka terhadap adat istiadat dan kebudayaan etnis lainnya.

Hasil-hasil penelitian di atas ini sesungguhnya tidak mengherankan karena hasil *polling* yang dilakukan sebelumnya oleh Forum Komunikasi Pemuda Melayu Sambas terhadap siswa kelas V dan VI sekolah dasar pasca kerusuhan 1999 sebagaimana dikutip oleh Harry S. Hartono (2001) menunjukkan bahwa seluruh responden (putra dan putri) menganggap etnis Madura sebagai musuh. Selain sikap rasial, kehidupan berkebangsaan di daerah Kalimantan Barat juga dihadapkan pada persoalan identitas keetnisan. Amrazi Zakso dkk. (2007) yang melakukan penelitian terhadap identitas keetnisan siswa SLTP dan SLTA di daerah rawan konflik di Kalimantan Barat menemukan tingginya identitas keetnisan pada masing-masing kelompok etnis. Identitas keetnisan dalam penelitian tersebut didefinisikan sebagai *"how strongly the individual feels about being his/her ethnic, having his/her friends with the same ethnic, and viewing someone of a different ethnic background"*, sebagaimana dikonsepsikan oleh Rosenthal dan Feldman (1992). Penonjolan identitas keetnikan ini, seperti juga penonjolan identitas kultural, dapat menjadi pemicu terjadinya konflik antar etnis.

Terlepas dari jawaban mana yang benar terhadap alasan terjadinya konflik antara etnis Madura dengan etnis lain yang ada di Kalimantan Barat, yang jelas konflik itu telah memberikan indikasi *belum terasimilasikannya etnis Madura dalam sistem budaya setempat*. Lantas*, apa makna pendidikan yang diselenggarakan kalau hasilnya prejudice antar etnis, sikap antar etnis yang negatif dan konflik ?*.

Pendidikan Salah Urus

Dalam rangka pembangunan bangsa, asimilasi (pembauran) merupakan masalah penting yang perlu mendapat perhatian bersama.

Pembauran ini mutlak dimantapkan agar stabilitas keamanan dan ketertiban negara tetap terjamin bagi terwujudnya pembangunan itu sendiri. Meskipun pembauran bangsa di Kalimantan Barat tidak hanya ditujukan pada etnis Madura saja namun hal ini menjadi semakin penting berkenaan dengan seringnya terjadi konflik antara etnis Madura dengan etnis lain (Dayak dan/atau Melayu) di daerah ini.

Upaya untuk mewujudkan suasana pembauran perlu dilakukan sedini mungkin, terutama kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa melalui berbagai bidang seperti lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan formal mempunyai peran yang sangat besar mengingat fungsi yang dibebankan ke lembaga ini.

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebenarnya arah pendidikan nasional (termasuk pendidikan di daerah) sudah jelas sebagaimana tampak dalam rumusan tujuan pendidikan dalam ketentuan tersebut. Namun, kesalahan-kesalahan penanganan pendidikan di Kalimantan Barat, kalau dianalisis, tampak mulai dari unsur peran hingga rancangan aksi. Pada unsur peran, terjadi tarik menarik antar berbagai institusi dalam penanganan lembaga pendidikan persekolahan. Pada jenjang sekolah dasar, di samping Departemen Pendidikan, Departemen Dalam Negeri melalui Dinas Pendidikan juga ingin mengatur pendidikan. Di lingkup sekolah lanjutan tingkat pertama maupun sekolah lanjutan tingkat atas (SMU/SMK) terjadi tarik menarik kepentingan antara operasional pendidikan (yang dipegang sekolah) dengan birokrasi pendidikan (yang dipegang Dinas Pendidikan). Kondisi seperti ini mengakibatkan konflik antar peran institusi dalam penanganan pendidikan menjadi besar. Akibatnya, sulit diharapkan pendidikan akan berhasil sebagaimana tujuan yang sudah ditetapkan.

Di samping konflik antar peran, ketrampilan pengelolaan pendidikan (baik pada level operasional sekolah: terutama ketrampilan mengajar guru, maupun level birokrasi administrasi pendidikan: dinas pendidikan) juga patut dipertanyakan. Kesalahan pengadaan guru yang sistematis (mulai dari rekrutmen mahasiswa calon guru, pendidikan calon guru hingga rekrutmen guru dan pembinaan guru) mengakibatkan jumlah guru yang *immerse* dengan profesinya tidak banyak. Insentif yang juga belum memadai meng-akibatkan guru seperti *kurang energi, kurang inisiatif dan frustasi* dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dari sisi lain, masuk-nya sejumlah orang yang tidak memahami esensi pendidikan ke dalam Dinas Pendidikan mengakibatkan institusi yang menangani birokrasi pendidikan menjadi institusi *sarang penyamun* yang hanya berpikir untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Karena kelembagaan pendidikan ditangani oleh orang-orang yang tidak memahami hahekat pendidikan, maka program-program pendidikan yang disusun lebih banyak *salah langkah* dan tidak

sesuai dengan visi maupun misi yang mau dicapai.

Kesalahan-kesalahan seperti ini mengakibatkan pendidikan seakan-akan tidak mampu berkontribusi dalam memecahkan konflik yang sering terjadi di daerah ini. Jika pengelolaan pendidikan terus seperti itu, maka tidak mustahil konflik-konflik tersebut akan terus berulang, dan yang rugi adalah masyarakat Kalimantan Barat sendiri.

Pendidikan Multikulur

Kalimantan Barat dengan potensi konflik yang sangat besar, membutuhkan lembaga pendidikan yang mampu menjadi lembaga pembudayaan yang kokoh dalam merekat rasa persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakatnya. Dalam praktek, lembaga ini menjadi sebuah lembaga birokrasi yang mekanistik, yang hanya berfungsi mentransfer ilmu sebagai produk kepada peserta didiknya, sehingga, "banyak hasil pembelajaran di sekolah tidak membumi dan sulit untuk direalisasikan (Purwasasmita, 2002:50). Ketidakmampuan lembaga pendidikan menjadi lembaga pembudayaan ini lebih disebabkan oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Salah satu alternatif model pengembangan lembaga pendidikan sebagai lembaga pembudayaan yang kokoh terutama dalam kaitan dengan pemecahan masalah konflik adalah penyelenggaraan pendidikan yang berbasis multikultural. Pendidikan multikultur merupakan proses yang tujuan utamanya adalah mengubah struktur sosial masyarakat melalui pengubahan kultur sekolah yang diisi oleh beragam etnis maupun kelas sosial (Alkin, 1992).

Ada 5 (lima) dimensi pokok dalam pendidikan multikultur, yakni: *(a). content intergration, (b). knowledge construction process, (c). prejudice reduction, (d). equity pedagogy, dan (e). empowering school culture (Banks, 1989; 1991; 1993).* Integrasi isi *(content intergration)* berkenaan dengan upaya-upaya guru untuk memasukkan informasi keetnisan dalam pembelajaran, seperti memberikan contoh, data, maupun informasi dari berbagai kebudayaan ras atau etnis sebagai ilustrasi dalam menjelaskan konsep-konsep kunci dari mata pelajaran yang diajarkan. Proses konstruksi pengetahuan *(knowledge construction process)* berkenaan dengan prosedur bagaimana guru membantu siswa memahami materi pembelajaran dan bagaimana posisi individual dan kelompok etnis/ras dan kelas sosial berpengaruh terhadap upaya memahami materi tersebut.

Dimensi pengurangan prasangka sosial *(prejudice reduction)* dalam pendidikan multikultur berkenaan dengan karakteristik sikap rasial siswa dan strategi-strategi yang dapat digunakan untuk membantu mereka menumbuhkan sikap dan nilai-nilai yang lebih demokratis. Dimensi keadilan pembelajaran *(equity pedagogy)* berkenaan dengan upaya guru memfasilitasi berbagai kelompok etnis atau kelas sosial agar mendapat kesempatan yang sama dalam perolehan pembelajaran. Sedangkan dimensi pemberdayaan kultur sekolah berkenaan dengan proses merestrukturisasi kebudayaan dan organisasi sekolah agar siswa

dari berbagai etnis dan kelas sosial yang beragam itu berkesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Kategorisasi dimensi pendidikan multikultur ini tidak *mutual exclusive*, boleh jadi ada dimensi yang tumpang tindih. Namun pengkategorisasian seperti ini sangat dibutuhkan untuk mempermudah konseptualisasi pendidikan multikultur.

Dalam kaitan pendidikan multikultur sebagai proses mengubah struktur sosial masyarakat melalui pendidikan, berbagai studi telah dilakukan antara lain oleh Gordon (1985); Gordon, Miller & Rollock (1990), Hilliard, Payton, & William (1990), dan Banks (1988). Hasil-hasil penelitian yang mereka lakukan menunjukkan bahwa dari sisi proses, faktor terpenting dalam pendidikan multikultur adalah strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan isi pendidikan multikultur yang terintegrasi dalam materi pembelajaran.

Dari uraian di atas tampak bahwa betapa pendidikan multikultur perlu mendapat perhatian dalam sistem pendidikan di di daerah rawan konflik etnis seperti di Kalimantan Barat. Dengan memasukkan konsep pendidikan multikultur dalam kurikulum pendidikan dan memberdayakan kultur sekolah ke arah iklim kebudayaan yang multikultur diharapkan di masa depan, konflik antar etnis yang sering terjadi tidak akan terulang lagi. Selain itu, tampak pula bahwa jalan terbaik untuk mengembangkan pendidikan multikultur adalah melalui model pembelajaran yang mendorong anak dari berbagai etnis untuk bekerja bersama dalam satu kelompok yang ada dalam kelasnya.

Untuk mengembangkan pendidikan multikultur, proses pembalajaran di sekolah juga harus bermuatan multikultural. Oleh sebab itu model pembelajaran yang cocok adalah model pembelajaran yang mampu mendorong anak dari berbagai etnis untuk bekerja bersama dalam satu kelompok, kemudian berkompetisi dengan kelompok lain dengan anak dari berbagai etnis pula yang ada dalam kelasnya. Model pembelajaran yang demikian hanya ditemui dalam model pembelajaran kooperatif.

Agar model pembelajaran kooperatif ini efektif untuk pendidikan multikultur, maka pengelompokkan anak harus didasarkan atas keragaman etnis. Setiap kelompok belajar harus mengandung anak dari berbagai etnis yang ada di kelas. Mereka didorong untuk bekerjasama antar berbagai etnis tersebut. Mereka juga dilatih untuk saling menghargai, mengurangi identitas keetnikan yang tinggi, serta dibiasakan dalam pergaulan yang sehat antar etnis yang beragam.

Penutup

Bertitik tolak dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa konflik di Kalimantan Barat di masa yang akan datang sesungguhnya dapat diminimalisasi dengan membangun sistem pendidikan yang lebih bersifat multikultural baik dalam isi, stragegi pembelajaran, maupun penciptaan kultur sekolahnya.

Dalam strategi pembelajaran pendidikan multikultur tersebut, model pembelajaran yang mampu mendorong anak dari berbagai etnis untuk bekerja bersama dalam satu kelompok, kemudian berkompetisi dengan kelompok lain dengan anak dari berbagai etnis pula yang ada dalam kelasnya. Setiap kelompok belajar yang dibentuk harus memuat anak dengan beragam etnis. Dengan model pembelajaran yang demikian, maka pendidikan multikultur yang dilakukan diharapkan dapat memberikan hasil sebagaimana diharapkan.

Daftar Pustaka

Alkin, Marvin C. (Ed.) (1992). *Encyclopedia of Educational Research*. New York: Macmillan Publishing Company.

Amrazi Zakso. (2000). "Sikap Rasial Siswa SLTP Daerah Rawan Konflik di Kalimantan Barat. Studi Pendahuluan untuk Pengembangan Pendidikan Multikultur di Kalimantan Barat". *Laporan Penelitian*. Pontianak: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat.

Amrazi Zakso. (2001). "Identitas Keetnikan Siswa di Daerah Rawan Konflik Kalimantan Barat. Studi pada Siswa SLTP dan SLTA Daerah Rawan Konflik Kalimantan Barat". *Laporan Penelitian*. Pontianak: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Kalimantan Barat.

Aronson, E., & Bridgeman, D. (1976). ***Jigsaw Groups and the Desgregated Classroom: In Persuit of Common Goals***. *Personality and Social Psyhology Bulletjn, 5, 438-446.*

Banks, James A. (1988). ***Ethnicity, Class, Cognitive, and Motivational Styles: Research and Teaching Implications***. *Journal of Negro Education, 57, 452-466.*

Banks, James A. (1989). **Integrating the Curriculum with Ethnic Content:Approaches and Guidelines**. Dalam J.A. Banks & A.M. Banks (Eds.). *Multicultural Education: Issues and Perspectives (pp.189-207)*. Boston: Allyn and Bacon.

Banks, James A. (1991). **The Dimensions of multicultural education**. *Multicultural Leader, 4, 5-6*.

Banks, James A. (1993). **Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, and Practice**. Dalam Hammond, Linda Darling (Ed.). *Review of Research in Education*. Washington: American Educational Research Association Publ.

Cross, W.E. Jr. (1991). *Shades of Black: Diversity in African American Identity*. Philadelphia: Temple University Press.

Davidson, N. (1985). **Small group Learning and Teaching in Mathematics: A Selective Review of the Literature**. Dalam, R.E. Slavin, S.Sharan, S.Kagan, R. Lazarowizt, C. Webb & R. Schmuck (Eds.). *Learning to Cooperate, Cooperating to Learn* (pp.

211-230). New York. Macmillan.

Gay, G. (1992). **The State of Multicultural Education in the United Stated**. Dalam K. Adam Moodley (Ed.). *Education in Rural Societies: International Perspectives (pp. 47-66)*. Calgary, Alberta, Canada: Detselig.

Gordon, E.W. (1985). **Social Science Knowledge Production and the Afro American Experience**. *Journal of Negro Education, 54, 117-133.*

Gordon, E.W. Miller, M., & Rollock, D. (1990). **Coping with Communicentric Bias in Knowledge Production in the Social Sciences**. *Educational Researcher, 19, 14-19*.

Hilliard, A.G.III., Payton, Steward L., & William, L.O. (Eds.). (1990). *Infusion of African and African American Content in the School Curriculum*. Morristown, NJ: Aaron Press.

IDRD. **Kalimantan Review**. *Nomor 44 April 1999*.

Klein, S.S. (Ed.). (1985). *Handbook for Achieving Sex Equity through Education*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Koentjaraningrat. (1982). *Masalah-masalah Pembangunan (Bunga Rampai Antropologi Terapan)*. Jakarta: LP3ES.

Lynch. J. (1987). *Prejudice Reduction and the Schools*. New York: Nichols.

Miles, B. M. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills: Sage Publication.

Polda Kalbar. (1999). *Laporan Akhir Kerusuhan Sosial Sambas*. Pontianak: Polda Kalimantan Barat.

Rosenthal, D.A., & Feldman, S.S. (1992). "The Nature and Stability of Ethnic Identity in Chinese Youth". *Journal of Cross Cultural Psychology*, 23, 214-227.

Slavin, R.E. (1985). **Cooperative Learning: Applying Contact Theory in Deseggated Schools**. *Journal of Social Issues, 41, 45-62.*

Sadker, M.P. & Sadker, D.M. (1982). *Sex Equity Handbook for School*. New York: Longman.

Sarlito Wirawan Sarwono. (2002). "Nilai Motivasi Tiga Etnis di Kalimantan Barat", *JPS: Jurnal Psikologi Sosial*, Vol. 8, No. 01. Juli 2002, h.60-65.

Schmuck, R.A. & Schmuck, P.A. (1983). *Group Process in the Classroom*. USA: W.C. Brown Company Publishers.

Tim Peneliti IIP. (1997/1998). **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kerusuhan di Kalimantan Barat.** *Laporan Penelitian*. Kerjasama IIP dan Pemda Tingkat I Kalbar.

Yasser Arafat. (1998). **Konflik dan Gerakan Etnik Dayak-Madura Di Kalimantan Barat Studi Mengenai Komunikasi Antaretnis dan Prasangka Sosial.** *Tesis.* Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM.